

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia kerja sekarang sedang mengalami sebuah badai perubahan, baik itu didalam organisasi bisnis, institusi pendidikan, maupun institusi pemerintahan. Perubahan itu sangat berkaitan dengan adanya teknologi informasi yang saat ini sudah sangat berkembang dan pentingnya kualitas informasi yang dihasilkan. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi dan menghasilkan informasi yang berkualitas pada suatu organisasi untuk menjadi organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi.

Delone and Mclean (1992:87) mengajukan suatu model kesuksesan sistem informasi yang terdiri dari 6 kategori yaitu: Kualitas sistem dan kompetensi menggunakan, kualitas informasi, kegunaan, kepuasan pemakai, kinerja individual, dan pengaruh organisasi. Dalam penelitian ini akan memakai hubungan antara kualitas informasi yang dihasilkan dengan kinerja aparatur pemda. Kualitas informasi tersebut berkaitan dengan karakteristik informasi sedemikian rupa sehingga output yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya. Hal tersebut mengakibatkan kualitas informasi tersebut mempunyai dampak langsung terhadap job satisfaction.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh dari kualitas informasi akuntansi dan kompetensi aparatur terhadap kinerja aparatur pemda pada Pemerintahan Kota Bandung. Kualitas informasi akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi, yang diterima dan yang dihasilkan oleh pemda. Kemudian kompetensi aparatur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat kompetensi atau kemampuan bersaing yang dimiliki individu yaitu aparatur atau orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan. Dari kedua faktor ini, akan diteliti apakah keduanya memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Peneliti sebelumnya yang diteliti oleh Nunuy Nur Afiah (2004) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap pelaksanaan Sistem Informasi akuntansi”. Menyimpulkan bahwa keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan sistem informasi akuntansi harus didukung dengan aparatur yang berkompeten khususnya dibidang akuntansi dilihat dari aspek pengetahuan, pengalaman, etika subjektif, dan etika objektif dan ditambah dengan pendidikan formal akuntansi, ataupun pendidikan nonformal melalui kursus dan pelatihan.

Salah satu dari masalah yang muncul adalah tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah. Misalnya saja, pada saat pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan, terdapat ketidakpastian dalam penentuan jumlah dana pertimbangan dari pemerintah pusat yang akan diterima. Karena meskipun terdapat formula perhitungan, namun kualitas informasi akuntansi yang diterimanya sebagai dasar perhitungan tersebut belum transparan. Hal ini berarti bahwa kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah belum menunjukkan keandalannya.

Semua faktor diatas sangat mempengaruhi kinerja aparatur dalam pembuatan keputusan oleh manajemen, sehingga apabila semua faktor sudah dipertimbangkan, maka manajemen mempunyai resiko yang lebih kecil untuk berbuat kesalahan dalam pembuatan keputusan. Semua faktor penting untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik. (Mas'ud Machfoedz. 1996:4)

Menurut Ketua BPK RI Hadi Poernomo, dalam rapat paripurna penyerahan buku Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2009 kepada DPR RI hasil pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, diantaranya kualitas laporan keuangan, kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Mardiasmo (2006: 35) mengungkapkan hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh ketua BPK bahwa diperlukan percepatan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah melalui *action plan* dengan langkah-langkah kongkrit, terjadwal, dan melibatkan seluruh komunitas di daerah. Pada akhirnya semuanya ini menuntut kemauan aparaturnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebagai upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum. Pernyataan tersebut diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP No 24 tahun 2005 tentang SAP dan permendagri No 13 tahun 2006. Namun, hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Daeng Nazier (Kepala Direktorat utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan Diklat BPK) yang dikutip dalam Surat Kabar Kompas Edisi Rabu, 29 April 2009 bahwa LKPD Tahun 2007 seharusnya diserahkan kepada BPK paling lambat bulan Maret 2008, akan tetapi sejumlah pemerintahan kota/kab terlambat menyerahkan laporan keuangan itu. Dari total 469 pemda, hanya 275 pemda yang menyerahkan LKPD tahun 2007 tepat waktu. Dari sini diketahui bahwa kinerja aparaturnya masih rendah dan belum optimal.

Keberhasilan kerja yang dilaksanakan oleh aparaturnya atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dalam pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya yang baik yaitu SDM

aparatur yang dianggap memiliki kemampuan serta system informasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam PP No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan. Dalam PP No 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran serta diperlukannya indikator kerja, standar biaya dan evaluasi kinerja aparatur dari setiap program. Peningkatan SDM aparatur yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan khususnya untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya citra negatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemda. Isu rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan pemda diduga karena kinerja aparatur yang masih kurang optimal. Kinerja aparatur yang kurang optimal diindikasikan oleh jumlah hasil kerja yang dilakukan oleh aparatur belum mencapai target dan kurang mengimbangi kebutuhan masyarakat. Pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan masih relatif sempit, kurang mampu menciptakan gagasan baru dan kurang semangat. Fakta ini menunjukkan bahwa produktivitas aparatur di Indonesia masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka produktivitas rata-rata 51,40%. Demikian pernyataan yang dikemukakan oleh kepala BKN pusat, Dr Edi Topo Asharai yang menilai bahwa tingkat

produktivitas PNS masih rendah dan belum optimal. (Dikutip dari: Redaksi Seputar-Indonesia 23 maret 2009).

Berdasarkan hasil pengamatan dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung masih terdapat OPD yang belum dapat menerapkan perubahan dengan adanya regulasi peraturan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurangnya tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat OPD, disamping itu ada indikasi rendahnya kinerja OPD dikarenakan kualitas aparatur dan kompetensi yang dimiliki. Di Biro keuangan aparatur yang memiliki pendidikan akuntansi hanya 5 orang yang berlatar belakang akuntansi dari sekitar 35 aparatur. Masalah tentang Pelaporan Keuangan, Kompetensi aparatur dan Kinerja Instansi Pemerintah kota Bandung diketahui belum sepenuhnya sesuai dengan SAP dan masih ada OPD yang masih belum memiliki aparatur yang mampu mengoperasikan dan memahami aplikasi prosedur penatausahaan keuangan daerah dan pembukuan. Selain itu masih terdapat OPD di pemerintahan kota Bandung yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara akurat dan tepat waktu kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah atau kepada Biro Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), salah satu hal ini dikarenakan kompetensi aparatur itu sendiri terhadap penggunaan sistem informasi dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini terbukti dengan masih terlambatnya menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) kepada biro keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan daerah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Pengaruh kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan	Khomeini Dikmar (2005) Universitas padjajaran	Pada umumnya karyawan kurang memahami kemampuan dalam keberhasilan kinerja karyawan dilihat dari kompetensinya yaitu <i>Motive, Trait, skill, knowledge, self concept</i> sehingga hasil kerja tidak seperti yang diharapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sama meneliti tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja aparaturnya. 2. Peneliti terdahulu ini hanya meneliti di satu OPD saja. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih luas yaitu dibebberapa OPD di kota Bandung.
Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SOPD.	Iman Abdurachman (2009) Universitas padjajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para aparatur yang bekerja belum sepenuhnya memahami pelaksanaan standar kompetensi yang berlaku. 2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan . 3. Informasi yang relevan yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 4. Informasi yang handal dan tidak tersesat dalam penyajian laporan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 5. Informasi yang didapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya untuk mempengaruhi keputusan 6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna yang mempengaruhi keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sama meneliti tentang masalah kompetensi aparatur di OPD 2. Dalam penelitian ini kompetensi aparatur sebagai variabel <i>independent</i> apakah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD (informasi akuntansi) sebagai variabel <i>dependent</i>, sedangkan penulis kualitas informasi akuntansi (laporan keuangan) dan kompetensi aparatur sebagai variabel <i>independent</i> apakah berpengaruh terhadap kinerja aparatur sebagai variabel <i>dependent</i>.
Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap kinerja aparatur dinas perhubungan, dinas koperasi UKM , dan Perindag pada pemerintahan kota Cimahi	Aniisah Fitriani (2010) Universitas Pendidikan Indonesia	Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur Pemda,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antara penulis terdahulu dengan penelitian penulis menggunakan indikator yang sama untuk melakukan pengukuran kompetensi dan kinerja aparatur pemda 2. Studi kasus penelitian terdahulu hanya dibebberapa OPD saja sedangkan penelitian penulis terdiri dari keseluruhan OPD kecuali kecamatan.

Mengacu pada fenomena yang ada maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini apakah Kualitas Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah kota Bandung. Selain itu, berdasarkan pertimbangan dari penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah kota Bandung selama ini. Keterlibatan pihak terkait tersebut perlu mendapat perhatian mengenai bagaimana tingkat kinerja pemda dan hal-hal yang ikut mempengaruhinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup dari pembahasan yang akan dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas informasi akuntansi secara parsial terhadap kinerja aparatur pemda pada pemerintahan kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur secara parsial terhadap kinerja aparatur pemda pada pemerintahan kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh kualitas informasi akuntansi dan kompetensi aparatur secara bersama-sama terhadap kinerja aparatur pemda pada pemerintahan kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi dan kompetensi aparatur pada OPD Pemerintahan Kota Bandung guna meningkatkan kinerja dari aparatur dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap kinerja aparatur.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja aparatur pemda.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas Informasi akuntansi dan kompetensi aparatur secara bersama-sama terhadap kinerja aparatur pemda.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti, peneliti lain serta mahasiswa yang ingin meneliti di topik ini adalah:

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Sistem informasi akuntansi khususnya
- b. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program studi S1 pada program studi akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia

- c. Khususnya dilingkungan perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan penelitian lebih lanjut.
- d. Sebagai dokumentasi ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang memiliki persamaan tujuan dengan penelitian ini.

2. Praktis

Kegunaan penelitian ini bagi instansi pemerintahan adalah:

- a. Penulis berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemda pada pemerintahan kota Bandung.
- b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan SIA secara teori maupun praktek di Indonesia khususnya di bidang pemerintahan.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.